

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Setiap entitas pencari laba ataupun nirlaba bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan oleh anggaran (Hansen dan Mowen, 2009:422). Anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja akan dinilai 33 berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran, oleh karena itu kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004:24). Anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran memerlukan banyak waktu dan biaya, disitu terlihat ada kecenderungan bagi perusahaan untuk menyusun anggaran dalam jangka waktu yang panjang. Sebuah organisasi membutuhkan anggaran untuk menerjemahkan keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan untuk

mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, serta mendorong timbulnya inovasi.

Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam Sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin (Puspitasari, 2011). Sedangkan akuntansi keuangan daerah memegang

peranan penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah. Sebagaimana ketahui akuntansi keuangan daerah berfungsi menghasilkan output berupa laporan keuangan yang akan menjadi dasar bagi penilaian kinerja pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah mekanisme penyusunan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya maka tujuan penulis proposal adalah :

Untuk mengetahui mekanisme penyusunan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Manfaat bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten (BAPPEDA) Bangkalan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan.
- b. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan Sebagai bahan referensi rekan-rekan Mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai

kinerja. Dan dapat menambah perbendaharaan kepustakaan khususnya dalam bidang ilmu akuntansi.

- c. Manfaat bagi Peneliti Untuk menerapkan teori-teori yang didapat pada saat kuliah dengan keadaan sesungguhnya, dalam hal partisipasi anggaran.

1.5 Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan Jalan Soekarno-Hatta . Observasi ini dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan 19 Februari 2016.